

# Opini Mahasiswa S2 PPKn



UNS  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET



## **Dilema Guru: Pendidikan Pancasila (PP), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)?**

*Oleh: Abdul Rozak, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

### **Fenomena perubahan nama mata pelajaran dalam setiap kurikulum,**

Fakta dalam dunia Pendidikan, dilapangan banyak guru yang masih bingung membedakan antara Pendidikan Pancasila (PP), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini terjadi karena perubahan nama dan cakupan mata pelajaran dalam beberapa kurikulum (KTSP 2006, K13, dan Merdeka). Walaupun sebenarnya ketiga istilah tersebut dalam konteks kurikulum Indonesia merujuk pada hal yang sama, akan tetapi evolusi terminologi secara sistematis ini memberikan dampak materi pembelajaran yang berbeda sehingga tidak memiliki acuan yang baku dalam implementasi pengajarannya. Integrasi ketiga penamaan tersebut menimbulkan kebingungan guru yang sangat kompleks, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Kurikulum Merdeka era menteri Abdul Mu'ti ini dapat menjawab argument tersebut.

Selama saya menjadi pengajar di sekolah menengah pertama lingkungan kabupaten grobogan, ruang lingkup materi ajar dari berbagai periode selalu mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari ruang lingkup materi PKn (KTSP 2006) berdasarkan Permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi yang berisi: 1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, 2) Norma, Hukum dan Peraturan, 3) Hak Asasi Manusia, 4) Kebutuhan Warga Negara, 5) Konstitusi Negara berdasarkan UUD 1945, 6) Kekuasaan dan Politik, 7) Globalisasi, dst. Pembelajaran yang memuat materi Pancasila hanya sebagai materi yang dikaitkan dalam materi – materi tersebut. Tantangan dilapangan pada kurikulum KTSP 2006 tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) banyak kritik atas dihilangkannya kata Pancasila atau posisi Pancasila yang hanya tersirat pada nilai, tidak eksplisit dalam nama menyebabkan pendangkalan pemahamannya ideologi sehingga pendekatan pembelajaran PKn tidak mampu menjawab isu – isu kontemporer dan konsep kewargaan modern dengan nilai – nilai Pancasila didalamnya. Sedangkan pada Kurikulum 2023 mengembalikan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai respons atas hal tersebut. Berdasarkan

Permendikbud No. 37/2018 tentang standar isi ruang lingkup mata pelajaran PPKn menjadi Empat Pilar Kewarganegaraan (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika). Kelemahan penerapan empat pilar ini cakupan materinya yang luas, mempersulit guru untuk memberikan materi apa yang harus disampaikan kepada siswa karena alokasi waktu terbatas. Walaupun redaksi perubahan nama PKn menjadi PPKn pada K13 diharapkan sebagai upaya Re-Idieologisasi Pendidikan Kewarganegaraan setelah periode netralitas idiologis pada era kurikulum sebelumnya, Akan tetapi luasnya cakupan materi yang termuat dalam empat pilar kebangsaan belum mampu menjawab respons kurikuler terhadap tantangan disintegrasi, radikalisme dan krisis ideologi bangsa Indonesia saat itu.

Pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka berfokus pada pembentukan karakter dan kompetensi siswa melalui penguatan nilai – nilai Pancasila, bukan sekedar teoritis dalam materi ini mencakup empat elemen penting yang terintegrasi yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kurikulum merdeka saat ini, ruang lingkup materi berdasarkan Permendikdasmen No. 12/2025 tentang Standar Isi baik sekolah dasar dan menengah termuat dalam dua Pendidikan yang berbeda yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dan keduanya memiliki penjelasan materi yang berbeda. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam aturan tersebut, “apakah dua mata pelajaran yang berbeda?” Ketidakjelasan terhadap nomenklatur penamaan tersebut menyebabkan multitafsir dikalangan pendidik. Hal ini menimbulkan dampak nyata salah satu contoh sederhana salah sebut nama guru dan dan nama mata pelajaran.

**Jadi Saya ini Guru mata pelajaran apa ? Pendidikan Pancasila, PKn atau PPKn ?**

Dilema saat ini, saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Gubug Kabupaten Grobogan atas perubahan redaksi nama yang tidak jelas tersebut juga menyebabkan kebingungan siswa memberikan panggilan mata pelajaran tersebut, siswa terbiasa menyebutkan mata pelajara PPKn akan tetapi redaksi pada kurikulum dan buku – buku mata pelajaran tertulis Pendidikan Pancasila. Hal ini juga menyebabkan saya

bingung sendiri “saya guru PKn atau Pancasila atau Keduanya ?”- Entahlah Tuhan pun yang tahu.

**Terjawab sudah ketimpangan itu,**

Walaupun demikian, dengan adanya perbedaan redaksi nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Permendikdasmen No. 12/2025 tersebut, berbanding terbalik dengan Surat keputusan BSKAP 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah memuat bahwa Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang berisi muatan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk murid menjadi warga negara yang cerdas, amanah, jujur, berbudi luhur dan bertanggung jawab. Dengan kata lain Pendidikan Pancasila dalam keputusan ini menjadi memuat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perbedaan redaksi ini menjadi bertolak belakang karena Permendikdasmen No. 12/2025 memuat kedua Pendidikan terpisah antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan dalam Surat keputusan BSKAP 046/H/KR/2025 Pendidikan Pancasila memuat Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan kata lain dalam surat keputusan tersebut nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila akan tetapi isinya materinya Pancasila dan Kewarganegaraan. SK BSKAP No. 046/H/KR/2025 merupakan pembaruan dari SK No. 033/H/KR/2022, yang menetapkan Capaian Pembelajaran (CP) untuk seluruh mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka dalam dokumen tersebut, nama mata pelajaran yang digunakan adalah: “PENDIDIKAN PANCASILA”. Tidak ada lagi penggunaan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seperti pada Kurikulum 2013, maupun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seperti pada KTSP 2006.

**Harapan kedepan ada aturan yang jelas,**

Kebingungan guru dengan dikotomi “Pancasila Vs Kewarganegaraan” yang saat ini dirasakan karena Permendikdasmen No. 12/2025 yang mencakup dua mata pelajaran berbeda, sudah terjawab oleh SK BSKAP No. 046/H/KR/2025, akan tetapi harapan kedepan terhadap Kurikulum Merdeka era Abdul Mu’ti ini adanya perubahan Permendikdasmen No. 12/2025 atas perubahan nomenklatur pergantian

nama atau penggabungan materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi satu bagian yang utuh “PENDIDIKAN PANCASILA”. Hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur bukan sekedar pergantian nama dan penggabungan materi, tetapi menyebabkan pergeseran paradigma dari Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat knowledge-based menuju pendidikan nilai yang action-oriented dengan Pancasila sebagai jiwa seluruh proses pembelajaran.

**Link:**

[https://www.kompasiana.com/abdulrozak6144/694368ffed64150f6a74f052/dilem-guru-pendidikan-pencasila-pkn-atau-ppkn?utm\\_source=Whatsapp&utm\\_medium=Refferal&utm\\_campaign=Sharing\\_Desktop](https://www.kompasiana.com/abdulrozak6144/694368ffed64150f6a74f052/dilem-guru-pendidikan-pencasila-pkn-atau-ppkn?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Desktop)

## **Ruang Pemuda Bersuara : Menghidupkan Pancasila di Tengah Riuh Media Sosial**

*Oleh: Afifatun Nisa Firda Wike Cahyani, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Ruang digital bukan lagi sekadar tempat berbagi foto liburan atau tren hiburan. Ia telah berkembang menjadi arena advokasi, ruang diskusi publik, dan panggung pembentukan opini. Bagi generasi muda, media sosial adalah ruang hidup sekaligus ruang perjuangan. Fenomena digitalisasi telah menggeser hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara bekerja, berbelanja, hingga berpendapat. Di Indonesia, perubahan ini tampak jelas pada bagaimana pemuda memanfaatkan media sosial sebagai ruang baru untuk menyuarakan pikiran. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar seperlima populasi nasional. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan potret potensi besar sebagai *agent of change* yang menggerakkan dinamika sosial politik bangsa. Dominasi pemuda di dunia digital menciptakan peluang untuk mengedepankan partisipasi publik. Ruang digital semakin dikuasai oleh kelompok usia produktif yang memiliki kemampuan tinggi dalam memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Namun di sisi lain, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga membuka potensi disinformasi, hingga penyebaran berita palsu atau *hoax*.

Pertanyaannya adalah: apakah kita akan membiarkan ruang digital dipenuhi kebisingan tanpa arah, atau menjadikannya sarana memperjuangkan nilai, keadilan, dan persatuan?. Selama Pancasila tetap menjadi kompas moralnya, maka gerakan digital bukan hanya sekadar tren, tetapi fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih terbuka, adil, dan beretika.

### **Media Sosial menjadi Ruang Pemuda dalam Bersuara**

Meningkatnya aktivitas pemuda di media sosial bukan sekadar fenomena komunikasi digital, melainkan telah menjelma menjadi ruang publik baru yang digunakan untuk berpendapat, mengadvokasi isu publik, dan mengawal kebijakan. Media sosial, menjadi arena advokasi modern yang bersifat cepat, interaktif, dan partisipatif. Aktivitas pemuda di media sosial menunjukkan munculnya tipe warga digital yang aktif bertanya, mengkritik, mengawasi, dan menawarkan solusi. Pola ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, karena mempraktikkan bentuk musyawarah modern melalui dialog, diskusi, dan perumusan opini di ruang digital.

Pemuda memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, X, dan Threads sebagai instrumen strategis dalam praktik advokasi digital. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi dimaknai sebagai tindakan pembelaan. Advokasi digital

kemudian hadir sebagai upaya advokasi melalui teknologi digital dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, memobilisasi kelompok, membangun kolaborasi, dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan maupun perubahan sosial (Aulia & Kusumasari, 2022). Advokasi digital juga sering disebut sebagai advokasi elektronik, aktivisme siber, atau aktivisme digital. Penggunaan platform tersebut tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme produksi wacana dan mobilisasi sosial. Akun-akun seperti @narasinewsroom, @malakaproject.id, @amnestiindonesia, dan @greenpeaceid dan akun-akun serupa, mampu merepresentasikan bagaimana media sosial digunakan secara aktif menyuarakan opini publik, mengawal isu sosial, politik dan lingkungan, mengawal kebijakan pemerintah serta memberikan edukasi politik yang mudah diakses. Konten yang mereka hasilkan mulai dari analisis kebijakan, kampanye kesadaran, hingga seruan aksi menunjukkan bahwa media sosial memiliki kapasitas besar sebagai arena musyawarah publik yang lebih terbuka dan setara. Melalui algoritma yang memperluas jangkauan pesan, mempercepat penyebaran informasi, serta menciptakan tekanan publik yang signifikan terhadap para pemangku kepentingan. Dengan demikian, advokasi digital yang dilakukan oleh pemuda bukan hanya mengekspresikan kepedulian, melainkan menjadi praktik politik baru yang memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi opini publik, mendorong akuntabilitas, dan memperluas partisipasi warga dalam proses kebijakan. Gerakan ini juga menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi ruang belajar, ruang kritik, dan ruang partisipasi publik. Ruang belajar tercermin dari produksi konten edukatif yang memudahkan masyarakat memahami isu kebijakan kompleks dengan bahasa yang ringkas dan visual yang informatif. Ruang kritik tampak dari keberanian pemuda mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah secara terbuka. Sementara ruang partisipasi publik dihadirkan melalui keterlibatan masyarakat dalam diskusi, kampanye kolaboratif, dan partisipasi dalam aksi digital yang memperluas demokratisasi akses politik. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial oleh pemuda memperlihatkan bahwa advokasi digital bukan sekadar fenomena komunikasi, tetapi merupakan strategi perubahan sosial yang terorganisasi dan memiliki potensi langsung dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik. Media sosial, dalam konteks ini, dapat dipahami untuk memperkuat suara warga, memperluas jangkauan isu, dan mengondisikan lahirnya budaya politik baru yang lebih partisipatif, setara, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

### **Pancasila sebagai Kompas Etis**

Ketika media sosial berkembang menjadi arena bersuara di ruang digital maka nilai-nilai Pancasila juga harus menjadi rujukan moral serta kompas nilai sehingga aktivitas pemuda di media sosial tidak hanya produktif tetapi juga beretika dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Pancasila berkembang sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila berfungsi memberikan arah

moral bagi cara kita berkomunikasi, berinteraksi dan memperjuangkan isu publik di ruang digital..

Setiap gerakan sosial, advokasi digital tentu membutuhkan kompas etis. Dalam konteks Indonesia, kompas itu adalah Pancasila. Pancasila bukan sekadar dokumen normatif yang dihafalkan saat upacara, tetapi Pancasila adalah nilai hidup yang relevan dengan dinamika digital masa kini. Ketika media sosial semakin bising dengan opini, perdebatan, dan perselisihan, nilai-nilai Pancasila hadir sebagai pedoman moral agar ruang digital tidak berubah menjadi medan perpecahan. Sila pertama menegaskan nilai-nilai keTuhanan menjadi dasar moral sehingga kehidupan tidak melenceng dari kaidah-kaidah agama. Sila kedua menegaskan pentingnya menjunjung martabat manusia. Ini berarti kritik harus berbasis fakta, tidak menyerang pribadi, dan tidak memproduksi kebencian. Sila ketiga menuntun kita menjaga persatuan. Ruang digital seharusnya tidak dibiarkan menjadi sumber polarisasi atau konflik identitas. Sila keempat menegaskan bahwa musyawarah adalah jalan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Di media sosial, ini bermakna memperkuat dialog, mengedepankan argumen rasional, dan membuka ruang bagi kritik yang konstruktif atau membangun. Sementara sila kelima mengingatkan bahwa tujuan akhir partisipasi publik adalah keadilan sosial. Apa pun bentuk advokasinya, pemuda perlu memastikan bahwa perjuangan itu berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan kelompok sempit.

Pancasila memberi kerangka agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi kebebasan untuk merusak. Dengan nilai-nilai tersebut, media sosial dapat menjadi ruang yang memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya. Pemuda dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperjuangkan isu-isu publik tanpa mengorbankan etika dan persatuan bangsa. Pada akhirnya, gerakan pemuda di media sosial adalah bagian dari transformasi sosial yang lebih besar. Mereka menjadikan media digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi media perlawanan, pendidikan, kolaborasi, dan perubahan sosial. Jika gerakan advokasi digital ini dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka media sosial dapat menjadi ruang perjuangan yang tidak hanya kritis, tetapi juga beradab dan membangun. Gerakan ini layak dirawat. Karena di tangan para pemuda dengan energinya kuat, dan kreativitasnya tak terbatas masa depan demokrasi digital Indonesia sedang dipertaruhkan. Media sosial akan terus menjadi medan besar pertempuran gagasan. Pertanyaannya adalah: apakah kita akan membiarkan ruang digital dipenuhi kebisingan tanpa arah, atau menjadikannya sarana memperjuangkan nilai, keadilan, dan persatuan? Pemuda Indonesia tampaknya telah memilih jalan kedua. Dan selama Pancasila tetap menjadi kompas moralnya, maka gerakan digital ini bukan hanya sekadar tren, tetapi fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih terbuka, adil, dan beretika.

**Link:** <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/2386954368/ruang-pemuda-bersuara-menghidupkan-pancasila-di-tengah-riuh-media-sosial>

## **Menghidupkan Pancasila dalam Interaksi Digital Masyarakat : Dari *Hate Speech* ke Etika Bermedia**

*Oleh : Axel Geofani Sasela, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Di era ketika jempol kita bisa lebih cepat bergerak daripada pikiran, ruang digital menjadi tempat semua orang berbicara dan menyampaikan isi pikiran sekaligus isi hati. Kemudahan yang ditawarkan di ruang digital membuat setiap orang sebagai pengguna (*user*) dapat mengakses dan menyebarkan setiap informasi yang berseliweran. Namun, ada sisi gelap yang ikut tumbuh yaitu *hate speech*, perundungan digital, hoaks, dan komentar penuh kemarahan yang kadang tidak kita sadari tapi ikut kita sebarkan sebagai bagian dari cara berinteraksi.

Di tengah riuhnya ruang digital, bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila diperhadapkan dengan beberapa pertanyaan mendasar seperti : Masihkah Pancasila relevan dengan cara kita berinteraksi di ruang digital ? Atau jangan-jangan nilai-nilai itu tinggal di buku pelajaran, sementara di kolom komentar kita berlaku sebaliknya?

### **Dunia Digital: Ruang Baru, Tantangan Baru**

Percakapan publik hari ini sudah pindah dari balai desa ke layar ponsel. Linimasa menjadi pasar raksasa tempat jutaan pendapat bertemu atau bertabrakan. Identitas mudah disamarkan, emosi cepat meledak, dan kebenaran sering kabur. Kita hidup pada zaman ketika berita bohong berlari lebih cepat dari klarifikasi, komentar pedas dianggap hiburan, perbedaan pendapat berubah menjadi keributan, dan konten negatif justru paling mudah viral. Kalau ruang digital ini kita anggap sebagai “rumah bersama,” tentu kita butuh etika yang membuat rumah ini nyaman dihuni. Di sinilah Pancasila hadir, bukan sebagai slogan, tapi sebagai panduan bersikap.

### **Pancasila: Bukan Hanya Dasar Negara, Tapi Etika Bermedia**

Nilai-nilai Pancasila sering terasa abstrak. Padahal, justru di dunia digital yang serba cepat dan rawan salah paham, nilai itulah yang bisa menjaga interaksi tetap sehat.

**Sila pertama** mengingatkan kita bahwa setiap agama mengajarkan kejujuran dan menghargai sesama. Sebelum menekan tombol “*irim*,” ada baiknya bertanya pada diri sendiri: apakah ini mencerminkan nilai moral yang aku yakini? Setiap kata meninggalkan jejak bukan hanya di dunia maya, tapi juga di hati.

**Sila kedua** mengingatkan bahwa di balik foto profil kecil, ada manusia sungguhan. Komentar yang kita anggap lucu bisa membuat orang lain terluka. Menghindari menghina fisik, menyebar aib, atau mempermalukan orang lain adalah wujud sederhana dari beradab di ruang digital.

Sementara **silanya ketiga** mengajak kita menjaga persatuan, tidak ikut menyebarkan konten yang memecah belah, dan tidak mudah terprovokasi isu sensitif. Berbeda pendapat itu wajar, tapi membenci karena berbeda pilihan bukanlah jalan keluar.

**Silanya keempat** menekankan kebijaksanaan dalam berdiskusi. Membaca informasi sampai tuntas, memeriksa sumber, dan menjawab dengan argument bukan emosi adalah bentuk sederhana dari demokrasi digital. Tak semua hal harus diperdebatkan; kadang yang bijak adalah diam dan tidak terpancing. Terakhir, silanya kelima mengingatkan bahwa ruang digital harus aman bagi semua : perempuan, anak-anak, minoritas, dan siapa saja. Menolak bullying, melaporkan akun penyebar kebencian, atau mendukung konten positif adalah cara menciptakan keadilan sosial versi dunia maya.

### **Dari *Hate Speech* ke Etika Bermedia : Perubahan yang Bisa Kita Mulai**

Interaksi digital sekarang bukan lagi sekadar ruang komunikasi, tetapi menjadi ruang sosial yang sangat menentukan bagaimana kita memahami diri, bangsa, dan nilai-nilai kebersamaan. Di balik kemudahan saling berkomunikasi, muncul tantangan serius: hate speech ujaran kebencian yang menyasar individu atau kelompok berdasarkan identitas seperti suku, agama, ras, gender, dan pandangan politik. Fenomena ini tak hanya merusak hubungan antarpersonal, tetapi juga berpotensi menggerus persatuan yang menjadi pilar utama Pancasila.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa, mengajarkan kita saling menghargai, gotong royong, dan menjaga persatuan. Prinsip ini harus hidup dalam seluruh bentuk interaksi sosial, termasuk di dunia digital. Media sosial seharusnya menjadi medium yang memperkuat persaudaraan, bukan tempat terjadinya konflik emosional yang memperuncing perbedaan.

Namun realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hate speech di ruang digital masih menjadi persoalan serius. Sebagai contoh, menurut riset bersama Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, selama masa kampanye politik dan pemilu 2024 ditemukan sekitar 180.000 konten media sosial yang berisi ujaran kebencian, terutama di platform seperti X (Twitter) dan lain-lain.

Data ini memperlihatkan bahwa meskipun ruang digital menawarkan peluang besar untuk berkolaborasi dan bertukar gagasan, masih banyak konten yang justru memicu kebencian, permusuhan, dan polarisasi. Jika fenomena ini dibiarkan tanpa upaya sadar memperbaiki etika bermedia digital, maka nilai-nilai Pancasila seperti Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mudah terkikis oleh relativisme digital yang menjunjung kebebasan tanpa tanggung jawab.

Ujaran kebencian tidak tumbuh begitu saja; ia lahir dari prasangka, kemarahan, dan kurangnya kendali diri. Tapi kita tidak tak berdaya. Perubahan dimulai dari kebiasaan kecil: menahan diri lima detik sebelum mengirim komentar, membaca

ulang tulisan kita, tidak membagikan postingan provokatif tanpa memeriksa sumber, dan tetap sopan meski berbeda pendapat. Pengendalian diri sering kali adalah bentuk keberanian yang paling nyata.

Kita juga bisa membangun budaya saling mengingatkan. Di grup keluarga atau komunitas, mengingatkan dengan halus seperti “beritanya belum jelas, yuk cek dulu,” jauh lebih efektif daripada memarahi. Gotong royong pun bisa hidup di ruang digital lewat berbagi informasi bermanfaat, mendukung UMKM, menggalang bantuan, atau mempromosikan karya teman. Media sosial bisa menjadi ruang yang terang jika kita mau menyalakan lampu, bukan api.

Sebagai pengguna, kita bukan penonton. Satu komentar sopan bisa meredam puluhan komentar kasar; satu unggahan inspiratif bisa mengubah suasana. Dalam dunia maya, setiap orang adalah produsen nilai. Kita menentukan apakah ruang digital terasa hangat atau justru penuh kebencian.

### **Contoh Sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari**

Hal-hal kecil seperti memilih kata yang tidak merendahkan, tidak memviralkan video kekerasan, tidak ikut-ikutan menghina figur publik, menjaga privasi orang lain, atau meminta izin sebelum mengunggah foto dapat memperbaiki suasana digital. Ketika percakapan mulai panas, mematikan komentar adalah pilihan bijak. Mengingatkan teman dengan santun dan membuat konten inspiratif juga bagian dari praktik Pancasila.

### **Penutup : Pancasila sebagai Kompas Moral Era Digital**

Dunia digital memang penuh drama dan cepat berubah, tapi di balik semua itu tersimpan peluang besar untuk belajar, berbagi, dan mempererat hubungan. Pancasila dapat menjadi kompas moral yang mengingatkan kita bahwa setiap komentar dan unggahan membawa nilai. Menghidupkan Pancasila di ruang digital adalah tugas kita semua warga maya sekaligus warga negara. Bila setiap orang mulai dari dirinya sendiri, perjalanan dari hate speech menuju etika bermedia tidak lagi hanya gagasan, tapi menjadi gerakan nyata. Ruang digital yang beradab bukan mimpi; ia menunggu pilihan kita setiap hari: menebar kebencian, atau menebar kebaikan.

Link : <https://narator.co/opini/menghidupkan-pancasila-dalam-interaksi-digital-masyarakat-dari-hate-speech-ke-etika-bermedia/>

## **MENGGALI KREATIVITAS PANCASILA DI ERA DIGITAL: BUKAN SEKADAR SLOGAN, TAPI GAYA HIDUP (KONTEN)**

*Oleh : Ikha Sudarwati, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Pernahkah Anda merasa Pancasila itu... membosankan?

Pancasila sering terasa jauh di tengah arus deras informasi, tren TikTok yang memikat, dan banyaknya isu-isu dunia yang mendominasi perhatian kita. Pancasila terperangkap dalam buku teks tebal, pidato formal, dan upacara bendera yang terasa jauh dari sehari-hari. Kita tahu Pancasila adalah dasar negara, tetapi bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar bagi konten kreatif kita di Instagram, TikTok ?

Dunia digital bukan lagi sekadar tempat hiburan, melainkan medan pertempuran ideologi dan etika. Jika Pancasila hanya menjadi slogan usang, Pancasila akan kalah bersaing dengan narasi-narasi global yang lebih populer

Artikel ini tidak akan membahas sejarah, tapi aksi. Kita akan membongkar lima sila Pancasila dan mentransformasikannya menjadi ide-ide konten viral, meaningful, dan fun. Tujuannya sederhana yaitu membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar fondasi politik, tetapi merupakan gaya hidup konten setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang keren dan beradab di era digital.

Pancasila sebagai ideologi aksi, bukan retorika usang. Dalam arus deras informasi digital, Pancasila sering kali terjebak dalam perangkap klise: Pancasila menjadi sekadar lagu kebangsaan yang dilantunkan saat upacara, atau rumusan kaku yang hanya muncul dalam soal ujian. Pertanyaannya, bagaimana kita menghidupkan Pancasila di ruang yang paling dinamis saat ini yaitu di media sosial? Pancasila sebagai ideologi terbuka, menuntut lebih dari sekadar pengakuan lisan. Pancasila menuntut aksi dan interpretasi kreatif yang relevan dengan zaman. Di era Presiden manapun, termasuk di masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, tantangan ideologis terbesar adalah merebut hati dan pikiran generasi muda dari ideologi transnasional yang radikal atau individualisme ekstrem. Media sosial adalah medan pertempuran ideologi ini.

Pendidikan Pancasila di sekolah formal sering kali gagal karena metodenya yang monoton. Media sosial menawarkan alat yang menarik untuk mengubahnya, dari sekadar hafalan menjadi praktik sosial yang otentik dengan membuat konten kolaboratif dalam pendidikan, misalnya dengan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat konten dengan mendapat pendampingan dari guru sebelum di upload di media sosial.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sering disederhanakan menjadi toleransi antar umat beragama. Di media sosial, kita bisa mengangkatnya lebih dalam konten berupa video pendek (Reels/TikTok) bertema Spiritual Nusantara. Aksi nyata dari

sila pertama Pancasila dengan membahas perbedaan dengan menunjukkan bagaimana praktik keagamaan/spiritual di berbagai daerah (misalnya, ritual adat menjelang panen di Jawa, Toraja, atau Bali) berintegrasi dengan alam dan budaya. Ini menunjukkan bahwa Ketuhanan di Indonesia tidak seragam, tapi berbudaya dan memperkaya identitas nasional dengan mencantumkan hastag: #KetuhananYangBerbudaya #SpiritualIndonesia #SilaSatuAksi

Di media sosial, wujud nyata sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah etika digital dan perlindungan data. Konten dapat berupa kampanye melawan cyberbullying, hoax, dan hate speech yang lebih personal. Menggunakan format podcast atau IG Live yang mengundang korban cyberbullying atau pakar hukum digital. Aksi nyatanya yaitu dengan meluncurkan gerakan #VerifikasiSebelumSebar (VSS). Desain infografis sederhana yang mengajarkan critical thinking digital. Sebelum share konten ini, kita dapat memperhatikan sumbernya, apa buktinya dan apa dampaknya dengan mencantumkan hastag: #KemanusiaanDigital #EtikaSosialMedia #AntiHoaxPancasila

Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia adalah menyatukan keberagaman yang indah. Media sosial sangat kuat dalam menonjolkan kekayaan lokal. Kita dapat membuat konten di TikTok/Reels: #33ProvinsiChallenge. Memberi semangat kepada pengguna untuk membuat video 15 detik yang menampilkan makanan, pakaian, atau tarian khas daerah mereka dengan backsound lagu daerah yang sedang di remix modern. Aksi nyatanya yaitu dengan mengkolaborasi antar kreator dari Sabang sampai Merauke dalam satu mega video yang menunjukkan keragaman budaya dari berbagai daerah yang diperkuat dengan pesan “Meskipun kita semua berbeda-beda secara budaya dan asal, kita tetap terikat dan berbagi ruang yang sama di platform digital nasional. Persatuan sejati bukan tentang menjadi seragam, tetapi tentang bagaimana berbagai perbedaan tersebut dapat saling terhubung dan terjalin dengan harmonis” dengan mencantumkan hastag: #BhinnekaTunggalIka#PersatuanVibes #KolaborasiNusantara

Sila Keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan terasa jauh bagi generasi digital. Kita perlu membuatnya terasa dekat dan menyenangkan (fun). Membuat konten dengan tema "Musyawarah Digital" atau "Simulasi Kebijakan Publik" di platform Twitter atau Instagram Stories dengan fitur polling, mengangkat isu sehari-hari (misalnya, "Apakah kantin sekolah/kampus harus buka 24 jam?"). Aksi nyatanya dengan menggunakan metode Debat Interaktif di live stream YouTube atau Instagram. Mengundang dua representasi pendapat yang berbeda, dengan memfokuskan pada mencari "Hikmat Kebijaksanaan" (jalan tengah terbaik) dari masukan audiens melalui kolom komentar. Hal ini mengajarkan proses musyawarah, bukan sekadar adu argument dengan mencantumkan hastag: #MusyawarahDigital #SuaraWarganetBijak #DemokrasiMuda

Pancasila sebagai dasar negara juga harus menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, yang diwakili oleh sila kelima. Di era digital, hal ini mendorong ekonomi kreatif yang berkeadilan. Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus diterjemahkan menjadi kesempatan yang sama dalam ekonomi digital. Kita bisa membuat konten serial "Pahlawan Lokal Digital" atau #UMKMPancasila dengan menampilkan kisah-kisah sukses UMKM dari daerah terpencil yang berhasil memasarkan produknya secara nasional atau global berkat media sosial. Aksi nyatanya dengan membuat Gerakan "Beli Lokal, Sebar Viral". Ajak follower untuk mempromosikan produk UMKM daerah mereka tanpa endorse berbayar, hanya dengan semangat gotong royong ekonomi. Hal ini merupakan wujud nyata sharing ekonomi ala Pancasila, di mana keberhasilan satu orang turut diangkat oleh komunitas.

Hastag: #KeadilanEkonomiDigital #UMKMPancasila #BeliLokalSebarViral

Pada akhirnya, kreativitas Pancasila di media sosial adalah tentang mengubah persepsi. Dari sekadar pelajaran sejarah yang wajib dihafal, menjadi personal branding diri dan *Nation Branding Indonesia*.

Jika setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mampu menampilkan konten yang merefleksikan nilai-nilai yang beretika digital (Sila 2), menghargai keragaman (Sila 3) dan mendukung UMKM lokal (Sila 5), maka Pancasila tidak lagi menjadi ideologi yang dipertanyakan. Pancasila akan menjadi gaya hidup (*life style*) dan budaya konten yang secara alami terpancar, menjadi filter sekaligus sumber inspirasi bagi bangsa. Ini adalah tugas kolektif kita untuk memastikan bahwa Pancasila di era digital bukan hanya bertahan, tetapi berkembang pesat, menarik, dan memenangkan persaingan ideologi global.

Link:

<https://www.kompasiana.com/sudarmiryam1174/69411a7f34777c0bba2dfd62/menggali-kreativitas-pancasila-di-era-digital-bukan-sekedar-slogan-tapi-gaya-hidup-konten>

## **MENGHIDUPKAN PANCASILA DI SEKOLAH DENGAN CARA YANG LEBIH DEKAT DAN BERMAKNA**

*Oleh :Imam Nashokha, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,*

Pancasila sudah sangat akrab di telinga kita. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita mengenalnya lewat hafalan lima sila, upacara bendera, dan pelajaran kewarganegaraan. Namun, jujur saja, tidak sedikit siswa yang memandang Pancasila sekadar sebagai kewajiban sekolah, bukan sebagai nilai yang benar-benar hidup dalam keseharian. Di sinilah tantangan pendidikan hari ini muncul: bagaimana membuat Pancasila tidak terasa jauh, kaku, dan membosankan, tetapi justru dekat dan relevan dengan kehidupan siswa.

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan tersebut. Pancasila tidak cukup diajarkan lewat ceramah atau buku teks. Nilai-nilainya perlu dihadirkan dalam pengalaman nyata yang bisa dirasakan, dilakukan, dan diulang setiap hari. Dengan pendekatan yang kreatif dan kontekstual, Pancasila bisa tumbuh menjadi kebiasaan, bukan sekadar hafalan.

Nilai Ketuhanan, misalnya, tidak harus selalu hadir dalam bentuk kegiatan formal keagamaan. Sekolah bisa menumbuhkan suasana religius yang lebih humanis dan inklusif. Ruang refleksi sederhana, kegiatan menulis jurnal syukur, atau gerakan kecil seperti saling menyapa dan berbuat baik setiap hari sering kali jauh lebih membekas bagi siswa. Dari kebiasaan sederhana inilah nilai spiritual tumbuh secara alami, tanpa paksaan.

Begitu pula dengan nilai kemanusiaan. Sekolah adalah ruang perjumpaan banyak karakter, latar belakang, dan emosi. Di sanalah empati seharusnya dipelajari. Program pendampingan antar siswa, ruang curhat yang aman, hingga kampanye anti-perundungan berbasis seni dapat membantu siswa belajar memahami perasaan orang lain. Ketika siswa belajar mendengarkan dan peduli, mereka sedang mempraktikkan nilai kemanusiaan secara nyata.

Nilai persatuan juga perlu diterjemahkan dengan cara yang lebih membumi. Persatuan bukan hanya soal upacara bendera atau menyanyikan lagu nasional, tetapi tentang rasa bangga dan memiliki terhadap Indonesia. Pameran budaya sekolah, proyek mengenal sejarah lokal, atau tantangan membuat konten positif tentang Indonesia di media sosial bisa menjadi cara yang dekat dengan dunia siswa. Dengan begitu, cinta tanah air tumbuh dari pengalaman, bukan sekadar slogan.

Sekolah juga dapat menjadi tempat belajar demokrasi yang sesungguhnya. Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, musyawarah kelas, atau pemilihan OSIS yang transparan memberi mereka ruang untuk belajar berpendapat dan menghargai perbedaan. Dari proses inilah siswa memahami bahwa demokrasi

bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang mendengar dan mencari jalan bersama.

Nilai keadilan sosial pun bisa dihidupkan melalui budaya saling membantu. Program tutor sebaya, kegiatan berbagi, atau proyek sosial sekolah mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Ketika siswa belajar membantu temannya yang kesulitan, mereka sedang mempraktikkan keadilan dalam bentuk yang sederhana namun bermakna.

Di era digital, nilai-nilai Pancasila juga perlu hadir di ruang maya. Tantangan membuat konten positif, kampanye etika bermedia sosial, atau proyek kreatif berbasis teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran karakter. Dengan cara ini, siswa tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab.

Lingkungan sekolah pun dapat menjadi “guru” yang efektif. Sudut-sudut sekolah yang bersih, taman literasi, dan gerakan peduli lingkungan mengajarkan nilai gotong royong dan keadilan ekologis secara langsung. Siswa belajar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama.

Pada akhirnya, menghidupkan Pancasila di sekolah bukan soal kegiatan besar atau program mahal. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, kreativitas, dan keteladanan. Ketika nilai-nilai Pancasila hadir dalam kebiasaan sehari-hari, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter.

Pancasila pun tidak lagi terasa sebagai pelajaran yang harus dihafal, melainkan sebagai panduan hidup yang mereka jalani setiap hari, di sekolah, di rumah, dan di tengah masyarakat.

Link :

[https://www.kompasiana.com/imamnashokha/6943d52289bff611fc482562/menghidupkan-pancasila-di-sekolah-dengan-cara-yang-lebih-dekat-dan-bermakna?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/imamnashokha/6943d52289bff611fc482562/menghidupkan-pancasila-di-sekolah-dengan-cara-yang-lebih-dekat-dan-bermakna?page=1&page_images=1)

## **Menyalakan Kembali Api Pancasila: Membentuk Karakter Generasi Muda Bontang melalui Pramuka**

*Oleh: Rani Ika Ramayanti, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Generasi muda Indonesia saat ini berada di persimpangan nilai yang akan menentukan masa depan negara. Dunia digital menawarkan keterbukaan, kecepatan, dan peluang tak terbatas, tetapi arus informasi yang tidak terkendali seringkali menghasilkan kabut moral: hoaks mengaburkan kebenaran, pencitraan mengalahkan kejujuran, dan provokasi identitas perlahan menggantikan semangat solidaritas. Bontang, sebuah kota yang berkembang pesat yang memiliki banyak budaya dan industri, juga mengalami hal ini. Meskipun kemajuan ini memiliki konsekuensi positif, ia juga menghadirkan tantangan besar dalam pembentukan karakter generasi mudanya.

Siswa Bontang tumbuh dalam lingkungan yang cepat, kompetitif, dan penuh teknologi digital. Cara mereka berpikir dan bertindak dipengaruhi oleh media sosial, gawai, dan arus informasi yang tak pernah berhenti. Sayangnya, kematangan karakter tidak selalu seiring dengan kemajuan ini. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila masih terlihat di sekolah, seperti kurangnya kejujuran dalam belajar, kurangnya rasa hormat terhadap guru dan sesama teman, dan kurangnya kepedulian sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa Pancasila seringkali tidak ada dalam kehidupan sehari-hari generasi muda Bontang.

Selama bertahun-tahun, kebanyakan orang hanya memahami Pancasila sebatas hafalan lima sila, teks dalam buku pelajaran, atau simbol yang diucapkan saat upacara bendera. Pancasila pada dasarnya adalah pedoman hidup yang dimaksudkan untuk membentuk semua orang Indonesia, yaitu mereka yang beriman, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Generasi muda mungkin tumbuh cerdas secara akademik, tetapi rapuh secara moral jika nilai-nilai ini tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, tujuan pendidikan saat ini bukan hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga membentuk generasi yang adil, jujur, dan mampu menghormati satu sama lain.

Nilai integritas Pancasila berakar pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki dimensi moral. Hubungan manusia dengan Tuhan dan nuraninya sendiri merupakan gambaran kejujuran, bukan sekadar aturan sekolah atau ketakutan akan hukuman. Keberanian untuk berkata benar, konsistensi antara perkataan dan tindakan, dan kejujuran meskipun tidak diawasi adalah beberapa contoh integritas dalam kehidupan siswa. Namun, kejujuran sering terpinggirkan oleh tekanan akademik, budaya instan, dan keinginan untuk "tampil baik". Dalam hal ini, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai kompas internal yang mengarahkan tindakan, bukan sebagai alat untuk mengontrol dari luar.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menanamkan rasa saling menghormati dan kejujuran. Menurut prinsip kemanusiaan, setiap orang memiliki martabat yang sama tanpa memandang agama, ras, suku, atau status sosial mereka. Kehidupan siswa di Kota Bontang yang beragam sangat relevan dengan nilai ini. Melihat teman dengan cara yang mengejek, merendahkan, atau membeda-bedakan tidak hanya melukai perasaan seseorang, tetapi juga merusak lingkungan akademik. Sekarang, kejujuran juga berarti tidak memanipulasi fakta, menyebarkan informasi palsu, dan bertanggung jawab atas setiap posting di media sosial.

Sementara itu, sila Persatuan Indonesia berfungsi sebagai landasan penting untuk membangun rasa saling menghormati dalam masyarakat yang heterogen. Di Bontang, seperti di seluruh Indonesia, ada beragam latar belakang budaya dan agama. Pancasila menekankan bahwa persatuan tidak berarti keseragaman; sebaliknya, itu berarti kemampuan hidup berdampingan dengan menghargai perbedaan satu sama lain. Sangat penting bagi generasi muda untuk memahami konsep ini agar mereka dapat bergaul secara terbuka, inklusif, dan dewasa baik di dunia maya maupun di sekolah.

Namun demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila perlu diajarkan secara praktis. Agar karakter benar-benar membentuk, itu harus dialami, dirasakan, dan dipraktikkan. Dari kesadaran ini, penulis memasukkan Pancasila ke dalam ruang pembentukan karakter melalui acara kepramukaan. Salah satu contohnya adalah Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru), yang diadakan di Bumi Perkemahan Taman Pramuka Kota Bontang dari tanggal 13–14 Desember 2025. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan generasi muda wahana belajar yang menyenangkan, menantang, dan bermakna.

Kepramukaan memiliki manfaat yang tidak selalu ditemukan dalam pembelajaran kelas formal. Siswa dihadapkan pada situasi nyata yang membutuhkan kerja sama, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kejujuran saat berpartisipasi dalam kegiatan di alam terbuka. Peserta Dianpinru tidak hanya belajar menjadi pemimpin, tetapi mereka juga belajar bagaimana memimpin dengan benar. Mereka menyadari bahwa kepemimpinan memerlukan contoh dan pelayanan, bukan kekuatan. Kejujuran mereka diuji ketika mereka harus melaporkan apa yang terjadi, bertanggung jawab atas kesalahan mereka, dan berani membuat keputusan yang adil untuk kepentingan kelompok.

Dalam dinamika regu, nilai sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, terbukti. Setiap keputusan dibuat melalui musyawarah dan mempertimbangkan pendapat semua peserta. Selama proses ini, siswa dilatih untuk menghargai perspektif yang berbeda dan bebas menyelesaikan masalah. Saling menghormati tidak diajarkan dengan ceramah; sebaliknya, itu dipelajari melalui berbicara dengan orang lain, berdebat dengan bijak, dan membuat keputusan dengan lapang dada.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sila kelima, yang ditunjukkan dengan pembagian tugas yang adil, perhatian terhadap anggota yang mengalami kesulitan, dan semangat gotong royong saat menghadapi kesulitan. Di perkemahan, tidak ada perbedaan status sosial; semua orang hidup sederhana, bergantung satu sama lain, dan membantu satu sama lain. Di sinilah empati muncul dan kesadaran bahwa keadilan dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.

Dengan bantuan Gladian Pemimpin Regu, Pancasila menjadi lebih dekat dan lebih nyata. Ini terjadi ketika siswa bekerja sama, bekerja dengan jujur, menghormati pemimpin regu, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan saling menghormati tidak dipaksakan; sebaliknya, mereka muncul secara alami melalui kebiasaan dan pengalaman hidup.

Pada akhirnya, untuk membangun karakter generasi muda Kota Bontang, diperlukan kolaborasi yang terus-menerus. Pendidikan karakter harus ditanamkan dalam kehidupan nyata melalui contoh hidup dan praktik. Pancasila bukan hanya tradisi sejarah; itu adalah pedoman hidup yang relevan di era konsumerisme, globalisasi, dan individualisme. Pancasila menjadi benteng moral dan kekuatan bangsa ketika nilai-nilainya benar-benar diterapkan.

Kita tidak membutuhkan generasi yang sempurna; sebaliknya, kita membutuhkan generasi yang memiliki nilai-nilai moral yang jelas. Pancasila adalah arah yang benar. Harapan yang tumbuh dari Perkemahan Taman Pramuka Kota Bontang adalah generasi muda yang baik hati, jujur, dan saling menghormati. Generasi ini akan membangun masa depan Kota Bontang dan Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai bangsanya.

*“Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah jatuh, tetapi bangsa yang selalu bangkit kembali dengan berpegang pada nilai-nilainya.”* Dan bagi Indonesia, nilai itu adalah **Pancasila**.

Link Access

<https://www.klausamedia.com/2025/12/16/menyalakan-kembali-api-pancasila-membentuk-karakter-generasi-muda-bontang-melalui-pram>

## **Pancasila di Era Disrupsi: Masihkah Relevan?**

*Oleh: Reksi, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Era disrupsi merupakan suatu fase perubahan besar yang terjadi secara cepat dan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi digital, internet, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), serta arus globalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bahkan berpikir. Perubahan tersebut membawa banyak kemudahan, tetapi juga melahirkan tantangan serius, terutama dalam hal nilai, moral, dan karakter individu sebagai warga negara.

Dalam konteks Indonesia saat ini, era disrupsi sering kali diiringi dengan kegelisahan sosial. Masyarakat semakin mudah terpecah oleh perbedaan pandangan politik, agama, maupun identitas kelompok. Media sosial menjadi ruang bebas yang tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab dan moral yang baik. Di tengah kondisi tersebut, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa kerap dipertanyakan relevansinya, khususnya oleh generasi muda dan pelajar yang hidup di tengah arus global dan digital.

Penulis memandang bahwa pertanyaan tentang relevansi Pancasila bukanlah bentuk penolakan terhadap Pancasila, melainkan refleksi kegelisahan generasi yang sedang mencari pegangan nilai di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pancasila di era disrupsi menjadi penting untuk menegaskan kembali bagaimana posisi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Memahami Era Disrupsi dalam Kehidupan Bangsa**

Era disrupsi ditandai oleh perubahan yang sangat cepat, bertolakbelakang, dan sering kali merubah tatanan lama. Digitalisasi yang terjadi saat ini, apalagi dengan masuknya revolusi industri 5.0 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, hingga budaya. Aktivitas yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini berpindah ke ruang digital. Informasi dapat diakses dalam hitungan detik, tetapi kebenaran sering kali kalah cepat dari opini dan sensasi yang berkembang.

Penulis mengamati bahwa kondisi bangsa Indonesia di era disrupsi menghadapi tantangan serius berupa melemahnya etika publik. Hoaks, ujaran kebencian, dan konflik di media sosial menjadi fenomena sehari-hari. Perbedaan pendapat sering berujung pada saling menghujat, bukan dialog yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti oleh kematangan nilai dan karakter yang baik pada masyarakat Indonesia.

Selain itu, era disrupsi juga memperluas kesenjangan sosial. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pendidikan digital. Di satu sisi, ada kelompok yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kondisi ini bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama sesuai dengan Sila Kelima Pancasila.

### **Pancasila sebagai Nilai Dasar yang Tidak Lekang oleh Zaman**

Pancasila pada dasarnya bukan sekadar simbol negara atau rangkaian lima sila yang dihafalkan. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa. Penulis menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tetap relevan sepanjang zaman, termasuk di era disrupsi seperti saat ini.

Misalnya, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap kemajuan harus disertai dengan kesadaran spiritual dan juga moral. Di tengah kecanggihan teknologi, manusia tidak boleh kehilangan nurani dan tanggung jawabnya. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia, termasuk dalam interaksi digital. Perundungan siber, penyebaran kebencian, dan kekerasan verbal jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Sila Persatuan Indonesia menjadi sangat penting ketika bangsa menghadapi ancaman disintegrasi akibat polarisasi sosial dan politik. Penulis berpandangan bahwa persatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan membangun

kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Dalam era disrupsi, persatuan harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar kebebasan berbicara, tetapi juga kemampuan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sementara itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan penting agar kemajuan teknologi dan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

### **Kondisi Pelajar Indonesia di Era Disrupsi**

Pelajar Indonesia merupakan generasi yang hidup sepenuhnya di tengah era disrupsi. Mereka tumbuh dengan gawai di tangan, terbiasa dengan media sosial, dan memiliki akses luas terhadap informasi global. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membawa tantangan serius dalam pembentukan karakter. Penulis melihat adanya kecenderungan menurunnya kedisiplinan, etika komunikasi, dan kepedulian sosial di kalangan pelajar. Fenomena seperti ketergantungan pada teknologi, rendahnya minat membaca, serta mudahnya terpengaruh oleh konten negatif menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Penulis memandang bahwa dalam konteks ini, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter pelajar. Nilai gotong royong dapat diwujudkan melalui kerja sama dalam pembelajaran. Nilai keadilan dapat ditanamkan melalui kejujuran akademik. Nilai demokrasi dapat dilatih melalui diskusi kelas yang menghargai perbedaan pendapat. Namun, penulis menilai bahwa pembelajaran Pancasila di sekolah sering kali masih bersifat teoritis dan kurang kontekstual. Pancasila diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai nilai yang hidup dalam keseharian pelajar. Akibatnya, pelajar sulit mengaitkan Pancasila dengan realitas yang mereka hadapi di era digital.

### **Revitalisasi Pancasila melalui Pendidikan**

Penulis memandang bahwa supaya Pancasila tetap relevan di era disrupsi seperti sekarang ini, maka diperlukan upaya revitalisasi, terutama melalui pendidikan. Penulis berpandangan bahwa Pendidikan Pancasila harus diarahkan pada penguatan

kesadaran kritis, reflektif, dan kontekstual. Pelajar perlu diajak berdialog tentang isu-isu nyata seperti etika bermedia sosial, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sebagai warga negara digital. Tentunya dalam hal ini guru memiliki peran strategis dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila di kelas. Pembelajaran tidak cukup hanya menjelaskan konsep, tetapi harus memberi teladan dan pengalaman nyata. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diamalkan oleh pelajar dalam kehidupan sehari-hari

### **Pancasila sebagai Jawaban atas Tantangan Disrupsi**

Penulis menegaskan bahwa Pancasila bukan penghambat kemajuan, melainkan penuntun arah perubahan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan disrupsi teknologi, bangsa yang memiliki nilai kuat akan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Pancasila memberikan kerangka etis agar kemajuan tetap berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Pancasila juga menjadi filter terhadap nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Bukan berarti menutup diri dari dunia global, tetapi menyaringnya secara bijaksana. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budayanya

Menjawab pertanyaan “masihkah Pancasila relevan di era disrupsi?”, penulis menegaskan bahwa Pancasila justru semakin relevan dan dibutuhkan. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan pelajar saat ini menunjukkan bahwa krisis utama bukan terletak pada kurangnya teknologi, melainkan pada lemahnya penghayatan nilai. Pancasila harus terus dihidupkan melalui pendidikan, keteladanan, dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menilai bahwa keberhasilan Pancasila dalam menjawab tantangan era disrupsi sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen bangsa. Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan konteks zaman, terutama melalui pendidikan yang kritis dan partisipatif. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa perlu diberi ruang untuk memahami, mengkritisi, dan mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan nyata, termasuk dalam ruang digital. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga dihayati sebagai pedoman moral dan etika sosial yang membimbing sikap serta perilaku warga negara di tengah dinamika perubahan yang terus

berlangsung. Dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai hidup, bangsa Indonesia dapat menghadapi era disrupsi secara cerdas, beradab, dan berkeadilan, tanpa kehilangan identitas dan jati diri kebangsaannya.

Link:

<https://beritadisdik.com/news/kaji/pancasila-di-era-disrupsi--masihkah-relevan->

## PANCASILA SEBAGAI FONDASI *NATION BUILDING* INDONESIA: MENGHADAPI FRAGMENTASI IDENTITAS DI ERA POLARISASI GLOBAL

Oleh: Salsabila Wahyu Mauludina, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Indonesia berdiri di tengah pusaran perubahan global yang luar biasa. Gelombang informasi digital mengalir tanpa batas, membawakan berbagai narasi- narasi identitas yang saling berkompetisi fundamentalisme agama dari Timur Tengah, liberalisme Barat, nasionalisme etnis yang menguat di berbagai belahan dunia, hingga ideologi transnasional yang menawarkan jawaban instant atas kompleksitas kehidupan modern. Di tengah hiruk pikuk ini, masyarakat Indonesia mengalami apa yang dapat disebut sebagai fragmentasi identitas kondisi di mana ikatan-ikatan kebangsaan yang selama ini merekatkan kebhinekaan mulai diuji oleh loyalitas-loyalitas baru yang melampaui batas negara. Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis. Kita menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak kita tau media sosial menciptakan ruang gema (*echo chambers*) yang mempertebal sekat antar kelompok, bagaimana isu-isu keagamaan dan etnis dengan mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik jangka pendek, bagaimana generasi muda terjebak dalam dikotomi identitas yang *rigid* harus memilih antara menjadi religius atau nasionalis, antara tradisional atau modern, antara global atau lokal.

Polarisasi ini bukan hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga menggoyahkan fondasi *nation building* yang telah dibangun sejak kemerdekaan. Di tengah krisis identitas global ini, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang luar biasa berharga namun sering dilupakan yaitu Pancasila. Bukan Pancasila yang dipahami sebagai retorika formal dalam upacara bendera atau hafalan yang membosankan di ruang kelas, melainkan Pancasila sebagai *living philosophy* sebuah sistem nilai yang hidup, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman. Pancasila, dengan kelima silanya yang saling berkaitan, menawarkan kerangka berpikir yang unik untuk membangun bangsa (*nation-building*) yang inklusif, adil, dan tangguh di era polarisasi global. Dalam konteks inilah, pertanyaan yang kemudian terbesit dalam pikiran tentang *nation building* muncul kembali dengan urgensi yang tinggi: apa yang menyatukan Indonesia? Apa yang membuat ratusan juta manusia dengan ribuan bahasa, ratusan etnis, dan puluhan kepercayaan bersedia mengaku diri mereka sebagai warga "Indonesia"? Apakah ikatan kebangsaan ini cukup kuat untuk bertahan di tengah badai polarisasi global, atau justru akan terkikis oleh loyalitas-loyalitas baru yang melampaui batas negara?.

Pancasila lebih dari sekadar symbol tetapi terletak pada sesuatu yang telah dimiliki Indonesia sejak kelahirannya sebagai bangsa. Namun, kita perlu memahami Pancasila bukan sebagai artefak sejarah yang dibekukan dalam museum atau hafalan wajib yang membosankan di sekolah, melainkan sebagai *living philosophy*

sebuah sistem nilai yang hidup, bernafas, dan terus relevan untuk menjawab tantangan setiap zaman. Pancasila menjadi sintesis brilian dari para pendiri bangsa yang berhasil menangkap esensi keberagaman Indonesia. Kekuatan Pancasila terletak pada karakternya yang holistik dan integratif. Pancasila tidak memaksa uniformitas, tetapi juga tidak membiarkan fragmentasi tanpa batas. Pancasila menciptakan ruang di mana identitas-identitas particular baik kesukuan, kedaerahan, keagamaan dapat berkembang dengan bebas, namun tetap dalam kerangka identitas nasional yang lebih luas. Inilah menjadi pencapaian yang luar biasa jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami konflik berkepanjangan karena tidak mampu mengelola keragaman. Indonesia, dengan kompleksitas yang tidak kalah tinggi, berhasil bertahan dan bahkan berkembang dan Pancasila adalah kunci dari keberhasilan ini. Akan tetapi, keberhasilan masa lalu tidak menjamin keberhasilan masa depan. Setiap generasi memiliki tanggungjawab untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap Pancasila, untuk mengaktualisasikannya dalam konteks zamannya. Jika generasi pendiri bangsa mengaktualisasikan Pancasila dalam perjuangan melawan penjajahan, jika generasi Orde Baru mengaktualisasikannya (meskipun dengan cara yang problematik) dalam pembangunan ekonomi, maka generasi hari ini harus mengaktualisasikan Pancasila dalam menghadapi tantangan fragmentasi identitas di era polarisasi global. Yang membuat situasi ini semakin kompleks ketika fragmentasi identitas tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Politik identitas yang eksploitatif telah mengubah keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan Indonesia menjadi sumber perpecahan. Isu-isu seperti suku, agama, dan ras yang seharusnya sudah terkelola dengan matang dalam kerangka bangsa, kini justru dibangkitkan kembali untuk kepentingan mobilisasi politik jangka pendek. Hasilnya adalah masyarakat yang terpolarisasi, di mana dialog digantikan dengan saling tuding, empati digantikan dengan kebencian, dan kepentingan bersama dikesampingkan demi kemenangan kelompok.

Salah satu kontribusi terpenting Pancasila dalam menghadapi polarisasi global adalah kemampuannya untuk melampaui dikotomi-dikotomi yang menyesatkan. Pancasila menawarkan kerangka berpikir yang sintetis, di mana nilai-nilai yang tampaknya bertentangan sebenarnya bisa diintegrasikan dalam harmoni yang produktif. Indonesia, melalui Pancasila, menunjukkan bahwa mungkin untuk menjadi religius sekaligus toleran, modern sekaligus memegang teguh nilai-nilai tradisi, demokratis sekaligus mengutamakan konsensus, dan kapitalis sekaligus peduli pada keadilan sosial. Ini bukan kompromi yang lemah, melainkan sintesis yang kuat dan menjadi sebuah jalan yang terbaik dari berbagai tradisi pemikiran tanpa terjebak dalam ekstremisme. Dalam praktiknya, ini berarti Indonesia tidak perlu mengikuti model *nation-building* yang sudah ada, baik model Barat yang liberal sekular, model Timur Tengah yang teokratis, model Tiongkok yang otoritarian developmentalis, maupun model apapun yang diklaim sebagai universal.

Indonesia memiliki jalannya sendiri, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Ini bukan soal chauvinisme nasional, melainkan tentang kepercayaan diri untuk membangun model yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Indonesia, sambil tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman bangsa lain. Jika kita serius ingin menjadikan Pancasila sebagai fondasi *nation building*, yang efektif, maka diperlukan berbagai sisi untuk menghadapi fragmentasi dengan:

Pertama, Reformasi pendidikan yang menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Pendidikan menjadi medan pertempuran identitas yang paling menentukan. Di ruang kelas, di kampus-kampus, di pesantren dan sekolah-sekolah, identitas generasi masa depan sedang dibentuk. Pertanyaan besarnya adalah: identitas seperti apa yang ingin kita bentuk?. Pendidikan Pancasila selama ini masih ditemukan kelemahannya dimana diajarkan sebagai mata pelajaran hafalan yang kering, terpisah dari realitas kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diminta menghafal lima sila tanpa memahami relevansinya dengan persoalan konkret yang mereka hadapi. Akibatnya, Pancasila dianggap sebagai retorika yang membosankan, bukan sebagai panduan hidup yang bermakna. Ketika mereka lulus dan memasuki dunia nyata yang penuh dengan kompleksitas moral, mereka tidak memiliki *framework* Pancasila yang fungsional untuk menavigasi pilihan-pilihan sulit. Pendidikan Pancasila yang transformatif harus dimulai dari perubahan paradigma. Pertama, Pancasila harus diajarkan bukan sebagai doktrin yang harus diterima tanpa pertanyaan, melainkan sebagai *framework* berpikir yang harus dipahami, didebatkan, dan diinternalisasi. Kedua, pendidikan Pancasila tidak boleh terbatas pada satu mata pelajaran, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh kurikulum. Ketiga, pendidikan harus menciptakan pengalaman langsung yang memperkuat nilai-nilai Pancasila. Keempat, pendidikan harus membekali generasi muda dengan literasi kritis untuk menghadapi boomerang informasi di era digital.

Kedua, Sisi Ekonomi sebagai Perikat atau Pemecah: Tidak ada *nation building* yang berhasil tanpa fondasi ekonomi yang adil. Orang bisa saja mengikuti upacara bendera dengan khidmat, bernyanyi Indonesia Raya dengan penuh semangat, tetapi jika perut mereka lapar, jika anak-anak mereka tidak bisa sekolah, jika mereka tidak melihat masa depan yang lebih baik, maka komitmen terhadap identitas nasional akan goyah. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem adalah persoalan waktu yang mengancam kohesi sosial. Ketimpangan bukan hanya soal kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tetapi juga kesenjangan antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok. Ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor formal dan informal, antara kelompok yang memiliki akses ke pendidikan dan modal dengan yang tidak. Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, memberikan mandat yang jelas: pembangunan ekonomi harus menguntungkan seluruh rakyat, bukan segelintir elit. Namun, realisasi mandat ini membutuhkan kebijakan yang konkret dan konsisten. Pertama, investasi masif dalam infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Kedua,

kebijakan perpajakan dan redistribusi yang progresif. Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM. Keempat, penyelesaian konflik agraria dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Ketiga, Ruang Publik yang Deliberatif: Demokrasi menjadi sistem politik yang telah dipilih Indonesia, dan Pancasila memberikan karakter khusus pada demokrasi Indonesia yang tidak sekadar mengandalkan voting mayoritas, tetapi mengutamakan musyawarah untuk mencapai konsensus. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia sering jauh dari ideal ini. Politik elektoral yang sangat kompetitif dan mahal telah mendorong politisi untuk mengeksploitasi sentimen identitas demi mobilisasi suara jangka pendek. Politik uang masih merajalela. Media massa, alih-alih menjadi ruang deliberasi publik yang sehat, sering menjadi alat propaganda atau sekadar pencari sensasi. Untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi *nation-building* yang efektif, kita membutuhkan reformasi ruang publik. Pertama, reformasi sistem pemilu yang mengurangi biaya politik dan mendorong kolaborasi. Kedua, penguatan mekanisme partisipasi publik di luar pemilu. Demokrasi tidak boleh terbatas pada lima tahunan memilih. Ketiga, media massa yang bertanggungjawab dan beragam. Keempat, pendidikan kewarganegaraan yang menekankan partisipasi aktif. *Civic education* harus mengajarkan keterampilan praktis bagaimana berorganisasi, bagaimana mengadvokasi kebijakan, bagaimana melakukan kampanye sosial bukan hanya teori tentang sistem politik.

Semua diskusi tentang Pancasila sebagai fondasi *nation-building* akan tetap menjadi retorika kosong jika tidak diterjemahkan ke dalam aksi konkret. Yang dibutuhkan adalah *roadmap* implementasi yang jelas, dengan target yang terukur, dengan alokasi sumber daya yang memadai, dan dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Pancasila sebagai bentuk yang tidak pernah selesai, *nation-building* bukanlah proyek yang punya titik akhir. Namun, proses yang terus-menerus, yang harus diperjuangkan oleh setiap generasi dengan cara dan dalam konteks masing-masing. Pancasila sebagai fondasi *nation-building* Indonesia bukan warisan yang kita terima begitu saja dan kemudian disimpan di museum, melainkan amanah yang harus kita aktualisasikan dan kita wariskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih baik.

Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini fragmentasi identitas di era polarisasi global adalah tantangan yang serius, tetapi bukan tanpa solusi. Indonesia memiliki modal yang kuat: keragaman yang luar biasa, pengalaman panjang dalam mengelola pluralitas, sistem nilai Pancasila yang komprehensif, dan yang paling penting ratusan juta warga yang pada dasarnya menginginkan kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang konsisten dan terukur, institusi yang kuat dan akuntabel, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Ketika semua ini berjalan sinergis,

ketika Pancasila benar-benar hidup dalam praktik kehidupan berbangsa sehari-hari bukan hanya dalam pidato dan upacara. Dengan demikian, Indonesia akan mampu melewati ujian fragmentasi identitas ini dengan sukses. Lebih dari itu, Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi dunia bahwa mungkin untuk membangun bangsa yang bersatu, adil, dan demokratis di tengah keragaman yang luar biasa.

Link:

<https://www.kompasiana.com/salsabilawahyuni1853/693fc43d34777c46425e8012/hebatnya-pancasila-menjadi-fondasi-nation-building-indonesia-meghadapi-fragmentasi-identitas-di-era-polarisasi-secara-globaln>

## **Pancasila, masih kah relevan dengan generasi muda saat ini?**

*Oleh: Tharuna Qalis Mula, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, Pancasila merupakan falsafah hidup yang tidak akan luncur dilekang zaman, dengan adanya perkembangan teknologi yang maju dan media sosial yang semakin massif ditengah Masyarakat, hal ini yang membuat kita sebagai Bangsa Indonesia harus bisa beradaptasi dengan nilai-nilai yang saat ini berkembang yang sesuai dengan Pancasila. Dengan adanya distrupsi yang sangat besar di generasi saat ini, menjadi tantangan dalam mengembangkan Pancasila sebagai Pedoman Hidup yang mengglobal, terutama dengan adanya gangguan dari berbagai ideologi yang ada di seluruh dunia, khususnya adanya Ideologi Liberalisme, Komunisme dan Fasisme yang saat ini marak terjadi di berbagai belahan dunia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di era kontemporer, yang menyebabkan diskursus mengenai relevansi dan kedudukannya menjadi relevan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pandangan terhadap Pancasila saat ini meliputi:

Globalisasi dan Pengaruh Ideologi Asing dimana arus informasi global yang cepat memudahkan masuknya berbagai ideologi, seperti liberalisme, kapitalisme, fundamentalisme agama, dan komunisme (dalam bentuk baru), yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya nilai-nilai lokal dan nasionalisme.

Perubahan Sosial dan Generasi Muda dengan adanya generasi milenial dan Gen Z memiliki cara pandang yang berbeda terhadap nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Mereka lebih terbuka terhadap isu-isu global dan seringkali mempertanyakan relevansi konsep-konsep lama dalam kehidupan modern, menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dalam pendidikan Pancasila.

Masalah Internal Bangsa yaitu isu-isu seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, intoleransi, dan polarisasi politik dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial dan persatuan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik bernegara seringkali dianggap belum optimal.

Interpretasi yang beragam dengan Pancasila adalah ideologi terbuka yang dapat diinterpretasikan secara beragam. Perbedaan penafsiran ini, terutama dalam konteks politik dan agama, terkadang menjadi sumber perdebatan dan konflik.

Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi konsensus dasar bernegara yang diakui dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Upaya untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan penguatan

institusi terus dilakukan, seperti yang dicanangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pancasila tetap relevan dikarenakan beberapa hal terkait yaitu *Pertama, Pancasila sebagai Pedoman dalam Memahami Perbedaan*, Generasi muda saat ini berinteraksi langsung dengan berbagai ide dan nilai dari seluruh dunia melalui internet. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan dasar nilai yang membantu mereka memahami dan menyikapi keragaman pandangan serta pengaruh global, mendorong pemikiran kritis dan penerimaan terhadap perbedaan, sambil tetap memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

*Kedua, Menjawab Kebutuhan akan Identitas dan Persatuan*, ditengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, Pancasila menawarkan satu landasan bersama yang melampaui perbedaan suku, agama, dan budaya. Bagi generasi muda, Pancasila menyediakan identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia dan menjadi perekat persatuan di tengah potensi polarisasi yang sering muncul, terutama di ranah media sosial. *Ketiga, Nilai Universal yang Kontekstual*, Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan tetap relevan yaitu

1. Ketuhanan: Menjawab kebutuhan spiritual di tengah krisis moral.
2. Kemanusiaan: Relevan dengan isu HAM, kesetaraan, dan keadilan global.
3. Persatuan: Penting untuk menjaga keutuhan bangsa.
4. Kerakyatan: Mendorong partisipasi demokrasi dan suara anak muda.
5. Keadilan Sosial: Relevan dengan isu ketimpangan ekonomi dan akses yang adil terhadap peluang.

Tantangan Implementasi, Bukan Relevansi Ideologi

Masalah yang sering muncul bukanlah ketidakrelevanan ideologinya, melainkan tantangan dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Generasi muda sering mengkritik praktik korupsi atau intoleransi yang bertentangan dengan Pancasila. Kritik ini justru menunjukkan bahwa mereka masih menggunakan Pancasila sebagai standar nilai untuk menilai kondisi negara.

Di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat, sering muncul anggapan bahwa ideologi Pancasila mulai kehilangan relevansinya, khususnya di kalangan generasi muda. Namun, pandangan tersebut sesungguhnya kurang tepat. Persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukanlah pada relevansi Pancasila, melainkan pada tantangan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari generasi muda.

Secara substansial, nilai-nilai Pancasila tetap relevan bahkan semakin dibutuhkan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan kebutuhan generasi muda akan

nilai spiritual di tengah krisis moral dan identitas. Nilai Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, serta Keadilan Sosial juga sejalan dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, toleransi, partisipasi politik, keadilan sosial, dan kesetaraan. Dalam konteks ini, Pancasila tidak bertentangan dengan modernitas, melainkan bersifat adaptif dan universal. Ia mampu menjadi landasan etis dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk budaya digital, pluralisme, dan global citizenship. Tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan, bukan diperdebatkan relevansinya. Generasi muda hidup dalam ekosistem digital yang sarat informasi instan, budaya populer global, serta pengaruh media sosial. Kondisi ini seringkali membuat nilai Pancasila dipersepsikan sebagai konsep normatif, abstrak, dan jauh dari realitas kehidupan mereka.

Selain itu, implementasi Pancasila sering terjebak pada pendekatan kognitif dan simbolik, seperti hafalan sila, upacara formal, atau slogan semata, tanpa diiringi pembiasaan sikap dan keteladanan nyata. Akibatnya, generasi muda memahami Pancasila secara teoritis, tetapi kesulitan menerjemahkannya dalam tindakan konkret, seperti sikap toleran, musyawarah, kejujuran, dan kepedulian sosial. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan implementasi ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pengalaman belajar kontekstual, yang mengaitkan nilai Pancasila dengan realitas kehidupan generasi muda, seperti interaksi di media sosial, partisipasi komunitas, dan isu-isu kebangsaan aktual. Selain sekolah, keluarga, masyarakat, dan figur publik juga memegang peranan penting. Keteladanan yang inkonsisten, praktik ketidakadilan, serta lemahnya penegakan nilai moral di ruang publik dapat melemahkan internalisasi Pancasila pada generasi muda.

## Kesimpulan

Pancasila tetap relevan, namun pendekatannya harus disesuaikan. Generasi muda membutuhkan cara yang lebih modern, interaktif, dan kontekstual—bukan sekadar indoktrinasi agar nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar dihayati dan diimplementasikan dalam tindakan nyata sehari-hari, baik di dunia nyata maupun digital.

Link: <https://detakkaltim.com/index.php/2025/12/16/pancasila-masihkah-relevan-dengan-generasi-muda-saat-ini/>

## **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sekolah: Membentuk Karakter Generasi Bangsa.**

*Oleh: Widya Handayani, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Pendidikan Pancasila merupakan fondasi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila harus diinternalisasi sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah. Lingkungan sekolah menjadi laboratorium pertama bagi siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan menguraikan bagaimana implementasi pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah dapat membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, toleran, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Pendidikan Pancasila di sekolah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai pengaruh budaya asing, pendidikan Pancasila menjadi benteng pertahanan ideologi bangsa. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik secara sistematis dan terstruktur. Urgensi pendidikan

Pancasila di sekolah semakin terasa ketika kita melihat berbagai fenomena sosial yang mengancam keutuhan bangsa, seperti intoleransi, radikalisme, separatisme, dan luntarnya nilai-nilai gotong royong. Melalui pendidikan Pancasila yang efektif, sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah infiltrasi paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Siswa yang memahami dan mengamalkan Pancasila akan memiliki filter yang kuat dalam menyaring informasi dan pengaruh negatif dari luar. Lebih dari sekadar pembelajaran kognitif, pendidikan Pancasila di sekolah harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal bunyi sila-sila Pancasila, tetapi lebih penting lagi adalah memahami makna filosofis dan mengimplementasikannya dalam perilaku nyata. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi proses pembentukan karakter yang utuh dan komprehensif.

Implementasi sila pertama di lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang menghormati keberagaman. Sekolah perlu menyediakan fasilitas ibadah yang memadai bagi seluruh siswa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kegiatan rutin seperti doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, peringatan hari besar keagamaan, serta pendidikan agama yang berkualitas menjadi manifestasi nyata dari sila pertama. Penting bagi sekolah untuk menciptakan iklim religius yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan bebas menjalankan ibadahnya tanpa diskriminasi. Toleransi antarumat beragama harus ditanamkan sejak dini melalui dialog antar agama, kunjungan ke tempat ibadah berbeda, dan pembelajaran tentang keragaman

agama di Indonesia. Dengan demikian, siswa akan tumbuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan menghormati perbedaan keyakinan.

Implementasi sila kedua mengenai nilai kemanusiaan di sekolah dapat diterapkan melalui pendidikan anti-perundungan atau bullying. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang, fisik, atau kemampuan akademik. Program buddy system, konseling, dan kampanye anti-diskriminasi menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan sila kedua. Sekolah juga perlu mengajarkan empati dan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan seperti bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, dan penggalangan dana untuk korban bencana. Kegiatan-kegiatan ini membantu siswa memahami bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Pendidikan karakter yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan akan membentuk generasi yang peduli terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Implementasi sila ketiga mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipelajari melalui kehidupan sekolah yang multikultur. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Sekolah harus menjadi miniatur Indonesia yang merayakan keberagaman ini. Melalui kegiatan seperti pentas seni budaya nusantara, festival kuliner daerah, dan pembelajaran bahasa daerah, siswa dapat mengenal dan menghargai kekayaan budaya Indonesia. Organisasi siswa intra sekolah juga menjadi wadah pembelajaran tentang persatuan. Dalam struktur organisasi, siswa dari berbagai latar belakang belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya organisasi. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi roh yang menghidupi seluruh aktivitas sekolah, sehingga siswa terbiasa hidup dalam keberagaman dan menghindari sikap primordialisme yang sempit.

Implementasi sila keempat mengenai demokrasi dan musyawarah dapat diajarkan melalui pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan pengambilan keputusan dalam berbagai forum sekolah. Siswa perlu dibiasakan untuk menyampaikan pendapat secara santun, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Pembelajaran demokrasi ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sekolah dapat membentuk forum-forum diskusi seperti parlemen siswa atau debat ilmiah untuk melatih kemampuan bermusyawarah. Dalam forum ini, siswa belajar bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berbicara dan didengar. Mereka juga belajar bahwa kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kultur musyawarah yang demokratis ini akan membentuk pemimpin masa depan yang bijaksana dan menghargai proses deliberasi.

Kemudian, implementasi sila kelima mengenai keadilan sosial di sekolah dapat diwujudkan melalui perlakuan yang adil terhadap semua siswa tanpa diskriminasi. Sekolah harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas, kesempatan, dan layanan pendidikan. Program beasiswa bagi siswa kurang mampu, remedial teaching bagi siswa yang tertinggal, dan pengembangan bakat khusus merupakan bentuk keadilan distributif dalam pendidikan. Selain itu, sekolah dapat mengajarkan nilai keadilan sosial melalui koperasi sekolah, kantin kejujuran, dan program ekonomi kreatif siswa. Kegiatan-kegiatan ini mengajarkan siswa tentang pentingnya distribusi kesejahteraan yang merata dan menghindari eksploitasi. Siswa juga perlu diajak untuk kritis terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat dan didorong untuk menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya bersifat teoretis dan hapalan semata. Diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik agar siswa tidak hanya memahami konsep Pancasila tetapi juga mengamalkannya. Metode pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi Pancasila dengan kehidupan sehari-hari siswa terbukti lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional yang monoton. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat diterapkan dalam pendidikan Pancasila. Misalnya, siswa dapat diberikan proyek untuk mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan sekitar dan mengusulkan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proyek seperti ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kepedulian sosial. Siswa menjadi subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek yang menerima informasi.

Pembelajaran Pancasila juga perlu mengintegrasikan teknologi dan media digital. Video pembelajaran, simulasi interaktif, dan platform diskusi daring dapat membuat pembelajaran Pancasila lebih menarik bagi generasi digital native. Guru dapat memanfaatkan media sosial untuk kampanye nilai-nilai Pancasila atau membuat konten edukatif yang viral. Namun, penggunaan teknologi harus tetap dibarengi dengan pembelajaran tatap muka yang membangun interaksi personal dan emosional antara guru dan siswa. Selain itu, pembelajaran Pancasila perlu melibatkan tokoh masyarakat, veteran, dan praktisi sebagai narasumber. Testimoni dan pengalaman nyata dari para tokoh ini dapat menginspirasi siswa dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang implementasi Pancasila. Kunjungan ke museum, monumen bersejarah, dan tempat-tempat yang memiliki nilai historis kebangsaan juga dapat memperkaya pembelajaran Pancasila dengan memberikan pengalaman langsung yang berkesan.

Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan pendidikan Pancasila di sekolah. Guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai teladan yang harus

mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi antara apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktikkan oleh guru menjadi kunci kredibilitas dan efektivitas pendidikan Pancasila. Siswa akan lebih mudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila jika mereka melihat guru mereka juga melakukannya. Kompetensi pedagogik guru dalam mengajarkan Pancasila perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan workshop. Guru harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang variatif dan menyesuaikannya dengan karakteristik siswa. Kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan namun bermakna sangat menentukan antusiasme siswa dalam belajar Pancasila. Guru yang inovatif akan mampu mengubah pembelajaran Pancasila dari yang membosankan menjadi menarik dan relevan. Selain itu, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan konteks historis Pancasila. Dengan pemahaman yang komprehensif, guru dapat menjelaskan Pancasila tidak sekadar sebagai hafalan tetapi sebagai ideologi hidup yang dinamis dan kontekstual. Guru juga harus mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi siswa, sehingga siswa memahami relevansi Pancasila di era modern.

Implementasi pendidikan Pancasila di sekolah tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah anggapan bahwa Pancasila adalah mata pelajaran yang membosankan dan tidak penting. Stigma ini perlu dihilangkan dengan mengubah paradigma pembelajaran Pancasila menjadi lebih menarik dan aplikatif. Sekolah perlu menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar teori abstrak tetapi pedoman praktis dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Kendala lain adalah kurangnya keteladanan dari para pemangku kepentingan pendidikan. Jika guru, kepala sekolah, atau bahkan orang tua tidak mencontohkan nilai-nilai Pancasila, maka siswa akan kesulitan mengimplementasikannya. Solusinya adalah dengan membangun budaya sekolah yang konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Semua stakeholder pendidikan harus berkomitmen untuk menjadi role model yang baik bagi siswa.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Solusinya adalah dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan kearifan lokal sebagai media pembelajaran Pancasila. Pembelajaran Pancasila tidak selalu memerlukan teknologi canggih atau fasilitas mewah. Yang terpenting adalah kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran yang bermakna dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar.

Pendidikan Pancasila di sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Melalui pendidikan Pancasila yang efektif, sekolah dapat mencetak generasi yang memiliki karakter kuat, nasionalisme tinggi, dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan melibatkan seluruh

komponen sekolah. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara tetapi benar-benar menjadi way of life bagi generasi muda Indonesia. Keberhasilan pendidikan Pancasila di sekolah akan menentukan masa depan Indonesia sebagai negara yang bersatu, adil, dan sejahtera.

Link: <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/2386954447/implementasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-kehidupan-sekolah-membentuk-karakter-generasi-bangsa>

## **Ketika Pancasila Tersaji di Ruang Kelas Madrasah Inklusi MAN 2 Sleman: Belajar Merangkul Perbedaan**

*Oleh: Yeni Susanti, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Sebuah potret kehidupan di ruang kelas. Begitu memasuki kelas X Madrasah Aliyah Inklusi, kita tidak hanya melihat kursi dan meja, tetapi kisah-kisah kecil tentang perjuangan, ketulusan, dan semangat belajar yang tumbuh berdampingan. Di sudut ruangan, seorang siswa tunanetra duduk sambil meraba buku braille, jarinya bergerak perlahan mengikuti titik-titik timbul yang menjadi panduan belajarnya. Di sisi lain, seorang siswa tunadaksa dengan kursi roda tengah berusaha mengatur posisi duduk yang nyaman. Sementara itu, seorang siswa tunagrahita ringan terlihat tersenyum sambil menunggu guru membagikan lembar kegiatan yang sudah disederhanakan khusus untuknya. Di kelas seperti inilah saya benar-benar merasakan bahwa Pancasila bukan sekadar kata-kata dalam buku pelajaran, melainkan nilai hidup yang hadir dalam setiap interaksi.

### **Belajar dari Keberagaman: Persatuan Indonesia dalam Praktik Nyata**

Setiap pagi, guru membuka kelas dengan sapaan hangat dan mengecek kesiapan semua siswa. Proses ini tampak sederhana, tetapi justru menjadi fondasi kuat dalam membangun kebersamaan. Siswa tunanetra dibacakan instruksi, siswa tunadaksa dibantu mengakses perangkat belajar, dan siswa tunagrahita diberikan arahan ekstra agar ia tahu apa yang harus dilakukan. Semua dilakukan tanpa membedakan siapa lebih cepat atau siapa lebih lambat.

Pada suatu kesempatan, saat kegiatan diskusi kelompok, seorang siswa tunanetra diminta menjadi moderator kelompok. Teman-temannya memosisikan diri agar ia dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Siswa tunadaksa membantu mencatat kesimpulan, sementara siswa tunagrahita menyampaikan pendapat sederhana tentang topik yang sedang dibahas. Pemandangan seperti ini adalah cerminan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia persatuan yang tidak dipaksakan, tetapi tumbuh dari kesediaan menerima perbedaan kemampuan sebagai bagian dari dinamika belajar. Di kelas inklusi, persatuan tidak hanya diucapkan, tetapi dilatih setiap hari. Mereka belajar bahwa bekerja sama bukan soal kesamaan kemampuan, melainkan kemauan untuk saling melengkapi.

### **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Ruang Kelas**

Salah satu pelajaran paling berarti dalam kelas inklusi adalah empati. Bukan empati yang diajarkan guru secara teoritis, tetapi empati yang tumbuh perlahan dari kebiasaan sehari-hari. Ketika seorang siswa tunanetra kesulitan mencari posisi duduk karena meja bergeser, siswa tunadaksa segera menawarkan bantuan. Sebaliknya, siswa tunanetra sering menjadi teman paling sabar bagi siswa

tunagrahita, mengulang instruksi dengan suara lembut agar ia bisa mengikuti pelajaran.

Saya pernah mendengar dialog kecil yang menghangatkan hati. Saat guru bertanya, “Apakah semua siap?” siswa tunagrahita menjawab pelan, “Belum Bu... saya masih bingung.” Siswa tunanetra yang duduk di sebelahnya berkata, “Nanti aku bantu jelasin, ya.”

Tidak ada yang menganggap temannya “beban”. Justru setiap bantuan kecil menjadi bagian dari proses belajar bersama. Inilah wujud Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memanusiaikan sesama dalam bentuk paling tulus.

Guru-guru di madrasah inklusi pun memainkan peran besar. Mereka membuat materi pelajaran dalam berbagai versi: braille untuk tunanetra, lembar visual sederhana untuk siswa tunagrahita, serta media digital yang bisa diakses oleh siswa tunadaksa. Semua dirancang agar setiap anak dapat belajar dengan martabat yang sama.

### **Musyawarah di Ruang Belajar: Demokrasi yang Dipraktikkan Sejak Remaja**

Kelas inklusi tingkat SMA bukan hanya tempat belajar pengetahuan, tetapi juga ruang latihan demokrasi. Dalam musyawarah ini, semua siswa diberi kesempatan bersuara. Siswa tunanetra mengungkapkan pendapatnya dengan percaya diri, sementara siswa tunadaksa sering menyumbangkan ide praktis terkait kegiatan di luar kelas. Siswa tunagrahita, meski kalimatnya sederhana, tetap diberi ruang berpendapat. Guru akan mengulang pertanyaan dengan bahasa lebih mudah, lalu menunggu dengan sabar hingga ia menjawab.

Proses seperti ini mengajarkan kepada seluruh siswa bahwa demokrasi bukan hanya milik mereka yang fasih berbicara atau berpikir cepat. Demokrasi justru menjadi wadah bagi semua suara, termasuk yang paling sederhana sekalipun. Di sinilah Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan hidup dengan penuh makna.

Pembelajaran musyawarah seperti ini dapat membentuk karakter remaja yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Mereka belajar bahwa keputusan bersama harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh anggota kelas, bukan hanya suara terbanyak.

### **Keadilan Sosial yang Tidak Sederhana: Setiap Anak Berhak Tumbuh**

Keadilan dalam kelas inklusi bukan berarti semua siswa mendapatkan tugas yang sama, tetapi mendapatkan kesempatan yang sama untuk berhasil. Itulah mengapa guru menyediakan diferensiasi pembelajaran:

- siswa tunanetra mendapatkan rekaman audio materi,

- siswa tunadaksa mendapat waktu tambahan saat ujian,
- siswa tunagrahita mendapatkan instruksi yang dipadatkan dan visual yang lebih jelas.

Ada yang mungkin mengira bahwa tindakan ini “berbeda-beda”, tetapi justru di sinilah letak Sila

Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan bukan keseragaman. Keadilan adalah memastikan setiap siswa memiliki akses setara terhadap pendidikan, terlepas dari kondisi fisik maupun intelektual mereka.

Kelas inklusi mengajarkan bahwa setiap orang memiliki cara terbaik untuk berkembang. Tugas pendidik bukan menyeragamkan, tetapi memberdayakan. Keadilan sosial dalam ruang kelas bukan konsep abstrak, tetapi program yang disusun dengan penuh kesadaran mengenai kebutuhan masing-masing anak.

### **Ketuhanan sebagai Pondasi Sikap Menghargai Sesama**

Sebagai madrasah, nilai religius menjadi bagian penting dari aktivitas harian. Doa sebelum belajar dibacakan secara bergiliran: siswa tunanetra yang suaranya tenang, siswa tunagrahita yang membaca perlahan, atau siswa tunadaksa yang memimpin dengan penuh semangat. Momen sederhana seperti ini mengajarkan bahwa nilai religius bersifat inklusif, bukan eksklusif.

Guru tidak hanya mengajarkan materi fikih atau akhlak secara tekstual, tetapi menghubungkannya dengan kehidupan nyata di kelas. Misalnya, guru menjelaskan bahwa membantu teman adalah bagian dari ibadah, menghargai keterbatasan orang lain adalah tanda ketakwaan, dan bersabar menghadapi perbedaan adalah bentuk penghayatan ajaran agama.

Inilah implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa nilai yang menguatkan rasa saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang.

### **Penutup: Ruang Kecil Tempat Nilai Besar Bertumbuh**

Di kelas madrasah inklusi tingkat SMA, Pancasila bukan semboyan yang dipajang di dinding kelas. Ia hadir dalam tawa siswa tunagrahita yang merasa dihargai, dalam kesabaran siswa tunanetra mendengarkan suara teman-temannya, dalam bantuan spontan siswa tunadaksa ketika melihat temannya kesulitan, dan dalam desain pembelajaran guru yang memastikan semua anak memperoleh hak belajar yang sama.

Kelas semacam ini mungkin tidak sempurna dan penuh tantangan, tetapi justru di ruang-ruang seperti inilah kita bisa melihat masa depan Indonesia: masa depan yang memahami perbedaan bukan sebagai jarak, tetapi sebagai jembatan kemanusiaan.

Dari kelas kecil ini, Pancasila tidak hanya diajarkan tetapi hidup, tumbuh, dan mewarnai cara anak-anak melihat dunia.

Sumber di Link :

<https://www.kompasiana.com/yenisusanti7328/693fb286ed64151a562ab2b2/ketika-pancasila-tersaji-di-ruang-kelas-madrasah-inklusi-man-2-sleman-belajar-merangkul-perbedaan>

## ***Hoaks, Hate Speech, dan Cyberbullying: Urgensi Memperkuat Pancasila sebagai Sistem Etika Digital***

*Oleh: Ica Klara Monica, Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menciptakan sebuah ekosistem publik baru yang kompleks, dinamis, dan tanpa batas. Pemakai internet di Indonesia sudah mencapai 221 juta, setara dengan 79,5 persen dari total populasi Indonesia. Namun, transformasi ini diiringi oleh tiga permasalahan seperti *hoaks*, *hate speech*, dan *cyberbullying*. Ketiganya bukan sekadar pelanggaran sopan santun terhadap individu, melainkan manifestasi dari krisis etika dan kohesi sosial. Permasalahan tersebut merusak sendi-sendi kehidupan publik dengan hilangnya kepercayaan, memicu polarisasi, dan menormalisasi kekerasan dalam wujud verbal dan psikologis.

Pendekatan yang ada selama ini dalam mengatasi masalah tersebut seperti pemblokiran konten, penegakan hukum pidana melalui Undang-Undang ITE, dan kampanye literasi media yang sering kali bersifat reaktif, parsial, dan tidak menyentuh akar masalah. Padahal akar masalahnya adalah kekosongan kerangka etika bersama yang mampu membimbing perilaku dan mengatur tata kelola ruang digital secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai yang paling legitimate dan komprehensif untuk diangkat menjadi sistem etika digital. *Hoaks*, *hate speech*, dan *cyberbullying* dapat dipahami sebagai masalah yang muncul dari lingkungan digital yang memungkinkan dan bahkan terkadang mendorong perilaku anti-sosial.

*Hoaks* adalah informasi yang sengaja direayasa untuk menyesatkan. Praktik ini merupakan penyangkalan langsung terhadap sila keempat, yang mengedepankan "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Musyawarah yang sehat tidak akan terjadi jika dibangun di atas pijakan fakta yang keliru. Lebih lanjut, *hoaks* sering dirancang untuk memecah belah dengan mengeksploitasi sentimen SARA dan politik, sehingga juga bertentangan dengan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. *Hoaks* berkembang cepat dalam *information ecosystem* yang terfragmentasi, dimana kredibilitas sumber informasi tergerus oleh kecepatan dan algoritma yang mendorong keterlibatan emosional, bukan kebenaran.

Kemudian *hate speech* adalah ekspresi yang merendahkan, mengancam, atau menghasut kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ujaran kebencian membuat martabat manusia menjadi stereotip, menghancurkan landasan dasar penghormatan antar sesama. Selanjutnya *Cyberbullying* merupakan perilaku agresif dan berulang yang ditujukan untuk melukai korban melalui media digital. Ini mencerminkan ketiadaan keadilan sosial

pada sila kelima dan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan pada sila kedua. Perilaku ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan timpang, dimana kekuatan digunakan untuk menindas yang lemah.

Degradasi etika di ruang digital Indonesia yang ditandai dengan maraknya *hoaks*, *hate speech*, dan *cyberbullying* memerlukan respons mendasar dengan memperkuat Pancasila sebagai sistem etika digital yang membingkai perilaku warganet. Dalam mengatasi permasalahan tersebut tentu perlu lebih dari sekadar larangan, namun diperlukan pembangunan sistem etika yang positif, konstruktif, dan berbasis nilai. Pancasila menawarkan sistem yang koheren karena kelima silanya saling terkait dan dapat membentuk sebuah kerangka lengkap untuk etika perilaku digital. Pada Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai ini menekankan bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya harus dibatasi oleh tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama. Setiap pengguna digital adalah wakil dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam interaksinya. Hal ini memberikan landasan etika yang melampaui hukum positif. Kebebasan berekspresi dibatasi oleh kesadaran bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya. Ini dapat diterjemahkan menjadi prinsip kejujuran digital dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, yang menjadi basis untuk mencegah *hoaks* dan *hate speech* bernuansa agama.

Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ini adalah prinsip inti untuk melawan *hate speech* dan *cyberbullying*. Nilai kemanusiaan menjunjung tinggi empati, rasa saling menghargai dan menghormati. Kampanye literasi digital harus mengajarkan konsep “*THINK before you share*” (*True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind*) sebelum membagikan konten atau berkomentar. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menjadi prinsip utama di setiap platform dan komunitas digital. Nilai ini menuntut terjemahan konkret seperti: mengembangkan empati kemampuan untuk memahami perasaan orang lain di balik layar. tidak merendahkan, mempermalukan, atau mendehumanisasi orang lain dalam bentuk apapun.

Sila Ketiga ”Persatuan Indonesia”. Pentingnya prinsip pemersatu dalam kebinekaan. Persatuan Indonesia memberikan kerangka untuk mengelola keberagaman di ruang digital. Ini berarti membangun algoritma dan desain platform untuk memperkenalkan perspektif yang beragam secara sehat. Literasi digital harus mengajarkan cara berdebat dengan santun dan membedakan antara kritik terhadap ide dengan serangan terhadap identitas kelompok. Kemudian Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Prinsip musyawarah untuk mufakat harus diadaptasi menjadi model tata kelola ruang digital yang partisipatif dan inklusif. Pengambilan keputusan tentang moderasi konten, misalnya, harus

melibatkan multi-stakeholder forum yang transparan, bukan hanya ditentukan sepihak oleh korporasi atau negara.

Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan sosial di ruang digital berarti memastikan akses yang setara, perlindungan hukum bagi korban, dan lingkungan yang adil bagi semua warga digital. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi panduan untuk kebijakan publik digital. Ini mencakup dalam hal keadilan akses (*digital divide*), keadilan perlindungan khususnya bagi kelompok rentan (anak-anak, perempuan, minoritas) dari serangan digital. *Hoaks*, *hate speech*, dan *cyberbullying* adalah tantangan kompleks yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam penyelesaiannya. Hal tersebut merupakan gejala dari krisis etika di ruang digital. Pancasila sebagai sistem etika digital memberikan kerangka nilai yang utuh dan khas Indonesia untuk membentuk warga yang bijak, beradab, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pancasila sangat penting untuk selalu dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara termasuk sebagai sistem etika digital dalam ruang digital.

Sumber di Link:

<https://www.kompasiana.com/icaklara21/69425d0734777c1348595cc3/hoaks-hatespeech-dan-cyberbullying-urgensi-memperkuat-pancasila-sebagai-sistem-etika-digital>